

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Jawa Barat merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki berbagai potensi daerah yang dapat diberdayakan, baik menyangkut Sumber Daya Air, Sumber Daya Alam dan Pemanfaatan Lahan, Sumber Daya Hutan, Sumber Daya Pesisir dan Laut serta Sumber Daya Perekonomian. Provinsi Jawa Barat secara geografis terletak di antara 5°50' - 7°50' LS dan 104°48' - 104°48' BT. Kawasan utara merupakan daerah berdatar rendah, sementara kawasan selatan merupakan daerah berbukit-bukit dengan sedikit pantai, dan kawasan tengah sebagai daerah dataran tinggi bergunung-gunung. Secara teritorial wilayah sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta, wilayah sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, wilayah sebelah timur berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah, serta wilayah sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda (www.ipb.com).

Berdasarkan Peraturan Daerah No 26 Tahun 2010 bahwa tanggal 19 Agustus 1945 ditetapkan sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat adalah sebuah Provinsi di Indonesia. Ibu kotanya berada di Kota Bandung dan merupakan Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia (www.jabarprov.go.id).

Provinsi Jawa Barat dengan luas 35.377,76 km² menurut Data SIAK Provinsi Jawa Barat didiami penduduk sebanyak 46.497.175 juta jiwa. Penduduk ini tersebar di 26 Kabupaten atau Kota, 625 Kecamatan dan 5.863 Desa atau Kelurahan. Kondisi semacam ini berpotensi besar untuk lahan pemukiman dan industri. Sehingga dengan wilayah yang sedemikian luas, pertumbuhan perekonomian dengan sumber daya manusia di Jawa Barat berpotensi untuk berkembang (www.jabarprov.go.id).

Jumlah penduduk di Jawa Barat sampai tahun 2010 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1
Jumlah Penduduk berdasarkan Hasil Sensus Penduduk (SP)
Di Provinsi Jawa Barat (1980-2010*)

No	Kabupaten/Kota	SP 1980	SP 1990	SP 2000	SP 2010
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KABUPATEN					
1.	Bogor	2.493.843	3.736.897	5.508.826	4.763.209
2.	Sukabumi	1.517.631	1.848.282	3.508.826	2.339.348
3.	Cianjur	1.387.578	1.662.089	1.946.405	2.168.514
4.	Bandung	2.669.200	3.201.357	2.470.909	3.174.499
5.	Garut	1.483.035	1.748.634	2.051.092	2.401.248
6.	Tasikmalaya	1.593.189	1.814.980	1.535.859	1.675.544
7.	Ciamis	1.367.578	1.478.476	1.462.197	1.531.359
8.	Kuningan	786.414	892.294	984.792	1.037.558
9.	Cirebon	1.331.690	1.649.483	1.931.066	2.065.142
10.	Majalengka	897.722	1.032.032	1.121.641	1.166.733
11.	Sumedang	723.627	831.835	968.848	1.091.323
12.	Indramayu	1.237.450	1.447.877	1.590.030	1.663.516
13.	Subang	1.065.251	1.206.715	1.329.838	1.462.356
14.	Purwakarta	457.973	563.102	700.104	851.566
15.	Karawang	1.236.604	1.491.992	1.787.319	2.125.234
16.	Bekasi	1.143.463	2.104.459	1.668.494	2.629.551
17.	Bandung Barat	-	-	1.245.097	1.513.634

(Bersambung)

(Sambungan)

No	Kabupaten/Kota	SP 1980	SP 1990	SP 2000	SP 2010
KOTA					
18.	Bogor	246.946	271.711	750.819	949.066
19.	Sukabumi	109.898	119.981	252.420	299.247
20.	Bandung	1.461.407	2.058.649	2.136.260	2.393.633
21.	Cirebon	223.504	254.878	272.263	295.764
22.	Bekasi	-	-	1.663.802	2.336.489
23.	Depok	-	-	1.143.403	1.736.565
24.	Cimahi	-	-	442.077	541.139
25.	Tasikmalaya	-	-	528.216	634.424
26.	Banjar	-	-	156.555	175.165
JAWA BARAT		23.434.003	29.415.723	35.723.473	43.021.826

Sumber: Badan Pusat Statistik Republik Indonesia

Berdasarkan Tabel 1.1 perkembangan penduduk di Jawa Barat setiap tahun secara fluktuatif semakin meningkat. Pemilihan Jawa Barat sebagai objek penelitian, karena Jawa Barat merupakan provinsi yang memiliki potensi daerah yang dapat diberdayakan dan merupakan salah satu provinsi yang memiliki jumlah penduduk paling banyak sesuai dengan data sensus 2010. Oleh karena itu diharapkan Provinsi Jawa Barat dapat menyumbang PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) dan pajak dengan jumlah yang besar pula.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Tujuan utama dari pembangunan ekonomi adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara itu distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) nasional menurut provinsi menjadi indikator yang tidak berarti dalam

mengukur ketimpangan dalam pembangunan ekonomi regional jika tidak dikombinasikan dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) (Tulus, 2003:143).

Menurut Subandi (2011:2), pembangunan telah menjadi pembicaraan yang tidak asing lagi didengar. Bagi politisi, teknokrat, dan pengusaha di banyak negara menganggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dihindarkan (suatu keniscayaan). Sehingga sering didengar retorika-retorika seperti: “Apapun yang terjadi komitmen pembangunan harus tetap dilanjutkan” atau “Seburuk-buruknya pembangunan masih jauh lebih baik daripada tidak melaksanakan sama sekali”.

Istilah pembangunan (*development*) tidak dapat disamakan dengan pertumbuhan (*growth*), karena laju perekonomian yang tinggi bukan berarti terjadi pembangunan yang tinggi, serta bukan berarti kemakmuran tinggi pula. Secara umum, pembangunan diartikan sebagai usaha untuk memajukan kehidupan masyarakat dan warganya. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi dari sudut tinjauan ekonomi dapat diterapkan oleh pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) (Subandi, 2011:2).

Pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara atau daerah merupakan salah satu indikator keberhasilan pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan penerimaan, pemerintah dituntut untuk melakukan strategi pembangunan yang tepat dan cermat. Tepat dalam pengertian bahwa strategi pembangunan yang diselenggarakan dapat merespon kebutuhan dan permasalahan ekonomi. Cermat dalam pengertian bahwa strategi faktor yang mempengaruhi dan atau yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi tersebut.

Kegiatan ekonomi secara garis besarnya dapat dikelompokkan ke dalam kegiatan memproduksi dan kegiatan mengkonsumsi barang dan jasa. Unit-unit

produksi memproduksi barang dan jasa, dan dari kegiatan memproduksi barang dan jasa ini timbul pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang telah dimiliki oleh berbagai golongan dalam masyarakat, sehingga dari pendapatan ini masyarakat dapat membayar pajak penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Proses pembangunan sosial dan ekonomi wilayah dilakukan secara berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk mensejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, strategi pembangunan haruslah ditekankan pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas untuk memacu pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) serta kesejahteraan masyarakatnya. Berdasarkan tujuan dan strategi pembangunan tersebut, maka pelaksanaan pembangunan harus diarahkan pada bidang-bidang yang dapat mensejahterakan masyarakatnya (Ismail, 2011).

Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, setiap daerah berhak mengelola pemerintahan dan keuangan sendiri tanpa banyak tergantung pada pemerintah pusat. Hal ini menuntut pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam menggali lebih banyak potensi perekonomian di daerahnya serta memainkan peranan yang lebih besar dalam merangsang aktivitas ekonomi daerah (Rosada, 2011).

Sejalan dengan hal tersebut, kinerja perekonomian Jawa Barat selama tahun 2009-2011 cenderung mengalami peningkatan, sebagaimana tercermin dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tabel 1.2 di bawah ini:

Tabel 1.2
PDRB Provinsi Jawa Barat Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)
Tahun 2009 – 2011

Tahun	PDRB	Laju Pertumbuhan (%)
2009	689,841,314.34	10,24
2010	771,593,860.47	12,24
2011	861,006,347.79	11,58

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat

Berdasarkan data pada tabel 1.2 bahwa laju pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Barat mengalami fluktuasi dari 10,24% pada tahun 2009 menjadi 11,58% pada tahun 2011. Laju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat tersebut tentunya tidak terlepas dari peran daerah Kabupaten atau Kota dalam menggerakkan roda perekonomian di wilayahnya masing-masing.

Secara rinci PDRB Kabupaten atau Kota di Jawa Barat menurut sektor lapangan usaha selama tahun 2008-2011 dapat dilihat pada Lampiran 1, yang terdiri dari 9 (sembilan) sektor lapangan usaha yaitu sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel, dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Selama periode tersebut lapangan usaha industri pengolahan masih menjadi dominan di Jawa Barat yang disusul dengan berturut-turut perdagangan, hotel, dan restoran.

Kinerja perekonomian Jawa Barat tersebut tidak terlepas dari pendapatan daerah yang diterimanya. (Mardiasmo dalam Aziz, 2005:4) berpendapat bahwa pemerintah daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan kepada publik dan melaksanakan program pembangunan.

Salah satu sumber pembiayaan yang penting bagi daerah adalah Dana Perimbangan. Sampai saat ini sebagian besar daerah kabupaten atau kota di Indonesia penerimaan terbesar berasal dari penerimaan dana perimbangan.

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pusat masih tinggi (Ismail dalam Aziz, 2005:4). Salah satu unsur dana perimbangan yang penting bagi daerah adalah dana bagi hasil penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang berlaku mulai tahun 2001. Hal ini dikarenakan pajak penghasilan orang pribadi terkait erat dengan kegiatan perekonomian daerah yang dapat memperkuat basis pendapatan (Aziz, 2005).

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang utama. Setiap tahun peranan penerimaan pajak bagi pembiayaan pengeluaran umum atau negara semakin besar. Salah satu sumber penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dikenakan kepada mereka yang telah memiliki penghasilan diatas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (Rahmadhona, 2008).

Pada Lampiran 2 terlihat peranan dana bagi hasil PPh Orang Pribadi terhadap total dana bagi hasil untuk Jawa Barat periode 2009-2011 masih sangat kecil, tetapi porsi dana bagi hasil PPh Orang Pribadi terhadap total dana bagi hasil cenderung meningkat. Ini menunjukkan di masa akan datang peranan PPh Orang Pribadi semakin besar. Kenaikan penerimaan PPh Orang Pribadi ini akan berdampak pada kenaikan dana bagi hasil PPh Orang Pribadi di Jawa Barat.

Penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut telah dilakukan sebelumnya oleh Aziz (2005) di Kota Semarang. Hasil regresi menunjukkan bahwa variabel PDRB signifikan terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi. Peningkatan 1 persen PDRB akan mengakibatkan peningkatan penerimaan

PPh Orang Pribadi sebesar 1,04%. Kecilnya angka koefisien ini menunjukkan bahwa peranan PPh Orang Pribadi masih sangat rendah dibandingkan dengan pajak-pajak lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).

Berdasarkan gambaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Jawa Barat maupun pusat mempunyai kepentingan yang sama dalam menghimpun penerimaan PPh orang pribadi di Jawa Barat secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengamatan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPh orang pribadi untuk Jawa Barat. Oleh karena itu, judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) (Studi di Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I dan II)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut sektor lapangan usaha di Jawa Barat?
2. Bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) menurut sektor lapangan usaha di Jawa Barat?
3. Bagaimana pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk menganalisis PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) menurut sektor lapangan usaha di Jawa Barat.
2. Untuk menganalisis Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) menurut sektor lapangan usaha di Jawa Barat.
3. Untuk menganalisis Pengaruh PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh OP) di Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki kegunaan secara teoritis sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan mengenai PDRB terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca maupun sebagai referensi dan bahan acuan penelitian yang sama di masa yang akan datang mengenai pajak penghasilan orang pribadi (PPh OP).

1.5.2 Aspek Praktis

Kegunaan praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan sebagai hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan dan sumbang saran bagi pemerintah daerah dan

pusat dalam mengelola Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH OP).

2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada Kantor Pelayanan Pajak mengenai pengaruh PDRB terhadap penerimaan PPh OP. Selain itu memberi masukan daerah yang makmur akan tetapi potensi pajaknya belum terserap.

3. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu dasar untuk mengetahui PDRB dan penerimaan PPh OP di daerah tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam skripsi ini akan dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub-bab. Sistematika penulisan skripsi ini secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting sehingga layak untuk diteliti disertai dengan argumentasi teoritis yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN LINGKUP PENELITIAN

Bab ini mengungkapkan dengan jelas, ringkas, dan padat mengenai landasan teori tentang PDRB dan pajak penghasilan orang pribadi (PPH OP). Bab ini

juga menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian ini, kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data, serta ruang lingkup penelitian yang menjelaskan dengan rinci batasan dan cakupan penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel dependen, variabel independen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel), serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan keadaan responden yang diteliti, deskripsi hasil penelitian yang telah diidentifikasi, analisis model dan hipotesis, dan pembahasan mengenai pengaruh variabel independen (PDRB) terhadap variabel dependen (penerimaan pajak penghasilan orang pribadi).

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan hasil penafsiran dan pemaknaan terhadap hasil analisis temuan penelitian dan saran secara kongkrit yang diberikan terhadap faktor-faktor yang berpengaruh dalam aspek praktis dan tujuan pengembangan ilmu.